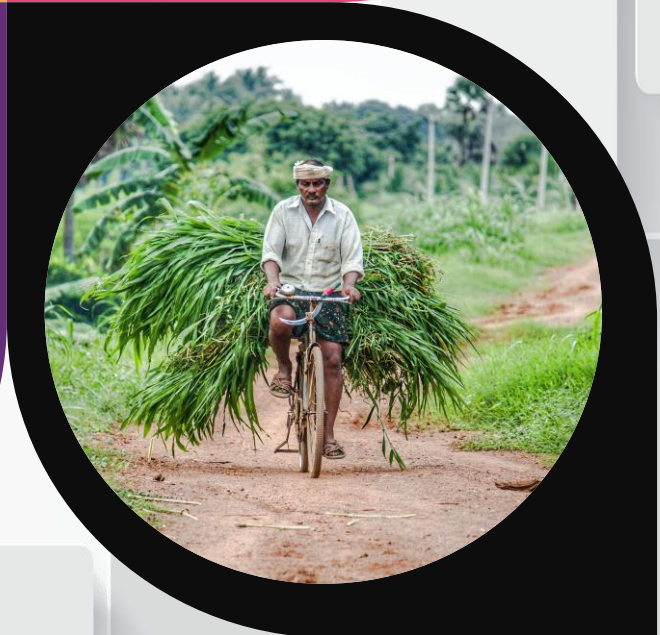




**RANCANGAN AKHIR
RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN
DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2025**



**DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2025**

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Perubahan Renja PD Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 akan saya laksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran OPD Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, serta mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Jawa Tengah Tahun 2025.

Semarang, Oktober 2025
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH


H. DYAH LUKISARI M.Si
NIP. 19661016 199203 2 006

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan tahunan yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan anggaran yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran yang memuat perubahan kebijakan, perubahan indikator kinerja, program, kegiatan dan anggaran yang disebabkan oleh perubahan prioritas pembangunan atau kondisi lain yang mempengaruhi pelaksanaan rencana kerja sebelumnya. Perubahan Rencana Kerja ini dibuat berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun berjalan.

Perubahan Renja DISHNAPAN Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025. Fokus perubahan Renja DISHNAPAN Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 memperhatikan pada percepatan pencapaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jateng tahun 2025-2029, Program Kegiatan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 yang diselaraskan dengan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah terpilih 2025-2029, arah kebijakan Prioritas Nasional (Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden), serta hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah, kerangka pendanaan, program dan kegiatan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, serta adanya penyesuaian atau perubahan target kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan DISHANPAN Provinsi Jawa Tengah tahun 2025.

Perubahan Renja DISHANPAN Provinsi Jawa Tengah berfungsi sebagai pedoman operasional dalam melaksanakan program dan kegiatan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Tahun 2025 yang disusun dengan mempertimbangkan upaya akselerasi pencapaian target kinerja secara tuntas bermanfaat bagi kemajuan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat dengan mengutamakan belanja-belanja yang langsung dirasakan masyarakat, efisiensi dan efektif untuk belanja pendukung kegiatan serta memastikan *redliness criteria* (kriteria kesiapan) kegiatan yang akan dilaksanakan.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360)
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 150);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 161);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 ((Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543)

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Memantapkan terselenggaranya program kegiatan prioritas DISHANPAN dan menjadi tolok ukur penilaian kinerja DISHANPAN Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama 1 (satu) tahun yang telah disesuaikan target indikator kinerja dan anggarannya sesuai dengan perkembangan dinamika yang terjadi.

2 Tujuan

- a. Menetapkan prioritas dan sasaran program kegiatan Tahun 2025 yang tertuang dalam arah kebijakan DISHANPAN berdasarkan hasil analisa dari evaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan sampai dengan triwulan II tahun 2025;.
- b. Memberikan pedoman operasional dalam penyusunan dan perumusan Perubahan Rencana Pagu Anggaran, Target Indikator Kinerja Perubahan, Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Perubahan, Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Renja DISHANPAN Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

Bab ini berisikan tentang latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan.

Bab II. Evaluasi Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

Bab III. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab ini menjelaskan tentang rencana perubahan pagu indikatif dan target indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2025.

Bab IV. Penutup

Bab ini memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam rangka pelaksanaan perubahan rencana program kegiatan Dinas Ketahanan Pangan.

BAB II
EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025

Dalam mewujudkan pembangunan ketahanan pangan di Jawa Tengah dilaksanakan program Peningkatan Ketahanan Pangan. Berdasarkan matrik pengukuran pencapaian kinerja DISHANPAN Provinsi Jawa Tengah terdiri dari:

1. Tujuan 1 : Mewujudkan Ketahanan Pangan Jawa Tengah
Sasaran : Indeks Ketahanan Pangan
2. Tujuan 2 : Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah
Sasaran : Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)

Realisasi pelaksanaan Renja Dinas Ketahanan Pangan sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 secara terinci dituangkan pada Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah sampai dengan Triwulan II Tahun 2025.

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Renja 2025	Renja Perubahan 2025
1	Mewujudkan Ketahanan Pangan Jawa Tengah (PE)		Indeks Ketahanan Pangan	Skor	85.34	85.47
		Meningkatkan Keterjangkauan/ Akses Pangan	Prosentase Penanganan Kecamatan Rawan Pangan	%	6	12
			Rata-rata Deviasi Harga Pangan Strategis (Beras)	%	10	8
		Meningkatkan Pemanfaatan Pangan	Skor PPH Provinsi	Skor	95.2	94.2
		Meningkatkan Ketersediaan Pangan	Angka Ketersediaan Energi	Kkal/kapita/hari	3.801	3.600
2	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	82	75,5
		Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	83	85
		Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah	Indeks Manajemen Risiko	Angka	2.97	2,91

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah s/d Triwulan II Tahun 2025

Nama Perangkat Daerah: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Capaian Realisasi Target Akhir Renja 2025
					Target Program Kegiatan Renja PD	Realisasi Renja PD s.d TW II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	100	100	100	100	100
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	100	100	100	100
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di BPMKP	%	100	100	50	100	100
	Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	100	100	100	100
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	22	7	4	57,14	7
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen	54	18	9	50	18
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	12	3	1	33,33	3
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	286	93	93	100	93
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	36	12	6	50	12
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah	Laporan	36	12	6	50	12
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	9	2	2	100	2

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Capaian Realisasi Target Akhir Renja 2025
					Target Program Kegiatan Renja PD	Realisasi Renja PD s.d TW II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	6	2	2	100	2
	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah	Laporan	12	4	2	50	4
	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis laporan pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	Laporan	3	1	0	0	1
	Sub Kegiatan Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	12	4	2	50	4
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	100	50	50	100
	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Dokumen	36	12	6	50	12
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	100	50	50	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	Paket	36	12	6	50	12
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	36	12	6	50	12
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	36	12	6	50	12
	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Laporam	3	1	1	100	1
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	36	4	2	50	4
	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen	36	12	6	50	12
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	36	12	6	50	12

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Capaian Realisasi Target Akhir Renja 2025
					Target Program Kegiatan Renja PD	Realisasi Renja PD s.d TW II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	35	7	8	114,29	7
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	35	7	8	114,29	7
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	84	24	12	50	24
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	36	12	6	50	12
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	36	12	6	50	12
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	36	12	6	50	12
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	204	84	33	39,29	86
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	70	23	8	34,78	23
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	5	1	0	0	1
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	140	60	15	25	60
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase komoditas pangan strategis dengan harga efektif sesuai ketentuan yang berlaku	%	70	55	78,57	142,85	55
		Rasio penyediaan cadangan pangan pemerintah provinsi	Angka	0,45	0,45	0,29	64,44	0,45

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Capaian Realisasi Target Akhir Renja 2025
					Target Program Kegiatan Renja PD	Realisasi Renja PD s.d TW II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Rata-rata kecukupan pangan	Angka	1,25	1,25	1,4	112	1,4
		Angka konsumsi beras Provinsi Jawa Tengah	kg/ kapita/ tahun	87,60	87,70	87,80	99,88	87,70
		Angka konsumsi beras Provinsi Jawa Tengah (DRP)	kg/ kapita/ tahun	87,60	87,70	87,80	99,88	87,70
	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah dokumen rekomendasi ketersediaan pangan yang diusulkan	Dokumen	3	1	0	0	1
		Prosentase sasaran stabilisasi harga sesuai dengan SOP	%	100	100	100	100	100
		Persentase peningkatan volume bahan pangan yang didistribusikan untuk stabilisasi harga	%	5	120	0	0	120
	Sub Keagata Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah dokumen pelaksanaan distribusi pangan melalui sistem logistik daerah	Dokumen	36	12	6	50	12
		Volume bahan pangan yang difasilitasi pendistribusiannya untuk stabilisasi pasokan	Ton	1.250	2.450	832,14	33,96	2.450
	Sub Kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	Jumlah informasi harga pangan	Dokumen	36	12	6	50	12
		Jumlah intervensi harga pangan	Paket	11	5	1	20	5
	Sub Kegiatan Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Jumlah laporan ketersediaan pangan yang disusun	Dokumen	36	12	6	50	12
	Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Persentase peningkatan volume cadangan pangan pemerintah provinsi	%	5	20	0	0	20
	Sub Kegiatan Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah cadangan pangan pemerintah yang dikelola	Ton	258	420	374,90	89,26	420
	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Rekomendasi ketersediaan sumberdaya pangan lokal yang disusun	Dokumen	3	1	0	0	1

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Capaian Realisasi Target Akhir Renja 2025
					Target Program Kegiatan Renja PD	Realisasi Renja PD s.d TW II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Sub Kegiatan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah kelompok / pelaku usaha pengembangan pangan olahan lokal dan pangan pokok lokal yang difasilitasi	Kelompok	87	12	0	0	12
	Kegiatan Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi	PPH Kab / Kota > 87	Angka	35	34	34	100	34
		PPH Kab / Kota > 87 (DRP)	Angka	35	34	34	100	34
	Sub Kegiatan Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah lokasi yang diberikan promosi/edukasi B2SA dan pangan lokal	Lokasi	35	5	6	120	5
		Jumlah Paket Bahan Pangan Lokal Yang Dibagikan / Dibantu	Paket	14.400	500	150	30	500
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Jumlah desa B2SA di daerah rawan pangan yang difasilitasi	Desa	72	5	2	40	5
		Jumlah desa B2SA yang difasilitasi	Desa	17	5	3	60	5
		Jumlah dokumen analisis PPH	Dokumen	3	1	0	0	1
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan	%	90	90	99,34	110,38	90
		Persentase rekomendasi jaminan mutu dan keamanan pangan yang diterbitkan	%	80	80	98,08	122,60	80
	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rekomendasi keamanan pangan segar yang disusun	Dokumen	3	1	0	0	1
		Prosentase kelompok / pelaku usaha yang penerapan hygiene sanitasinya meningkat levelnya	%	25	20	10	50	20
		Jumlah dokumen rekomendasi keamanan pangan segar yang disusun	Dokumen	3	1	0	0	1
		Persentase produk pangan segar teregistrasi yang diawasi di peredaran	%	70	67	89,7	133,88	67
		Jumlah sertifikat jaminan mutu dan keamanan pangan pada balai	Dokumen	6	2	0	0	2

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Capaian Realisasi Target Akhir Renja 2025
					Target Program Kegiatan Renja PD	Realisasi Renja PD s.d TW II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah lokasi pengawasan ijin edar	Lokasi	138	20	11	50	20
		Jumlah masyarakat yang teredukasi tentang mutu dan keamanan pangan	Orang	950	250	152	60,80	250
		Jumlah sampel pangan segar yang diawasi	Sampel	850	500	271	54,20	500
	Sub Kegiatan Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah kelompok yang didampingi dalam penyusunan doksistu	Kelompok	19	3	2	66,67	3
		Jumlah pelaku usaha yang dibina dalam penerapan higiene sanitasi	Kelompok	67	20	6	30	20
	Sub Kegiatan Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Sampel Pangan yang Diuji	Sampel	310	90	85	94,44	90
	Sub Kegiatan Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah dokumen sertifikat dan/atau registrasi yang diterbitkan	Dokumen	116	50	104	208	50
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase penurunan daerah rawan pangan dan gizi	%	0,01	0,01	0	0	0,01
	Kegiatan Persentase penurunan daerah rawan pangan dan gizi	Presentase penanganan daerah rawan pangan	%	6	5,5	0	0	5,5
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	Tersusunnya peta Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Dokumen	36	12	6	50	12
		Jumlah rekomendasi kebutuhan kerawanan pangan lintas sektor	Dokumen	3	1	1	100	1
		Jumla peta FSVA yang disusun	Dokumen	3	1	0	0	1
		Tersusunnya dokumen manajemen food loss dan atau food waste	Dokumen	3	1	0	0	1
		Jumlah Desa Rawan Pangan dan Gizi yang difasilitasi	Desa	72	30	30	100	30
		Jumlah desa Stunting yang diintervensi	Desa	55	40	40	100	40

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

3.1. Rencana Kerja (Renja) Perubahan dan Perubahan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025

Rencana Kerja Perubahan Dinas Ketahanan Pangan (DISHANPAN) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Renstra DISHANPAN Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi dan program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah terpilih 2025-2029, arah kebijakan Prioritas Nasional (Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden). Program prioritas dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan Peningkatan Indeks Ketahanan Pangan yang dilaksanakan oleh DISHANPAN Provinsi Jawa Tengah pada satu urusan wajib non pelayanan dasar yaitu urusan pemerintah bidang pangan dengan jumlah total anggaran perubahan APBD Tahun 2025 sebesar Rp 47.104.866.000,- yang terdiri dari 4 program:

- a. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat sebesar Rp. 18.903.525.000,-
- b. Program Pengawasan Keamanan Pangan sebesar Rp. 1.829.123.000,-.
- c. Program Penanganan Kerawanan Pangan sebesar Rp 7.055.935.000,-.
- d. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Rp 19.316.283.000 .

Rincian kegiatan, sub kegiatan dan alokasi anggaran untuk masing-masing program diuraikan pada Tabel 3.1. Rencana Kerja Perubahan dan Perubahan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025

3.2. Manajemen Risiko Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025

Manajemen risiko adalah sebuah proses untuk mengidentifikasi, menilai, mengelola, dan mengendalikan peristiwa atau situasi potensial untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan organisasi. Proses manajemen risiko dimulai dengan mengidentifikasi peristiwa yang mungkin timbul dan dapat mengganggu pencapaian tujuan organisasi. Tingkat risiko residual harus berada pada level yang dapat diterima oleh manajemen (*risk appetite*). Organisasi akan menyusun dan memutakhirkan register risiko (*risk register*), yaitu sebuah daftar atas semua risiko signifikan yang mungkin berdampak pada kemampuan organisasi untuk mencapai tujuannya.

Pengelolaan risiko strategis OPD bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis OPD yang tertuang dalam dokumen Perencanaan Strategis OPD (Renstra OPD). Sedangkan pengelolaan risiko operasional OPD bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran operasional kegiatan utama OPD. Pengelolaan risiko strategis dan operasional tingkat OPD dilakukan oleh masing-masing Pimpinan OPD bersama jajaran manajemennya, sebagai Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2 dan dibantu oleh Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 3 dan 4. Hasil diskusi unit pemilik terhadap atribut-atribut risiko (pernyataan risiko, skala risiko, penyebab risiko, dampak risiko, rencana tindak lanjut atas risiko, pemilik risiko dan target waktu penyelesaian) yang tertuang pada Tabel 3.2. Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Risiko Program/Kegiatan Perangkat Daerah DISHANPAN Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.

Identifikasi risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa dan bagaimana sesuatu dapat terjadi, sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan / sasaran Perangkat Daerah atau tujuan / sasaran Kegiatan. Risiko yang berhasil diidentifikasi akan dikelompokkan berdasarkan sumber risiko antara lain 1) Konteks strategis, adalah tataran identifikasi risiko Perangkat Daerah berkaitan dengan lingkungan strategis yang mempengaruhinya; 2) Konteks sumber daya manusia, adalah tataran identifikasi risiko Perangkat Daerah (PD); 3) Konteks keuangan, adalah tataran identifikasi risiko dalam penatausahaan keuangan di lingkungan PD; 4) Konteks sarana dan prasarana, adalah tataran identifikasi risiko dalam penatausahaan sarana dan prasarana di lingkungan PD; 5) Konteks program dan pelaporan, adalah tataran identifikasi risiko dalam pengendalian program aplikasi utama di lingkungan PD, dan ketertiban pelaporan; 6) Konteks sistem dan prosedur, adalah tataran identifikasi risiko dalam ketersediaan dan pelaksanaan sistem dan prosedur di lingkungan PD. Sedangkan Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap risiko yang telah teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya untuk menetapkan level atau status risikonya. Analisis Risiko dilaksanakan untuk menentukan tingkat dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian Tujuan Perangkat Daerah.

Tabel 3.1. Rencana Kerja Perubahan dan Perubahan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah
								RKPD		APBD		P-RKPD		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah						Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	82	21.255.029.000	82	21.423.958.000	75,5	19.316.283.000	Dinas Ketahanan Pangan
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah					Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	83	20.505.029.000	83	20.673.958.000	85	18.995.382.000	Dinas Ketahanan Pangan
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	19.872.529.000	100	20.041.458.000	100	18.350.586.000	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	3	16.104.222.000	3	16.273.151.000	3	14.899.929.000	SUB BAGIAN KEUANGAN
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	93	15.316.222.000	93	15.485.151.000	93	14.254.439.000	SUB BAGIAN KEUANGAN
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	378.000.000	12	378.000.000	12	376.274.000	SUB BAGIAN KEUANGAN
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah	Laporan	12	410.000.000	12	410.000.000	12	269.216.000	SUB BAGIAN KEUANGAN
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	2	118.000.000	2	118.000.000	2	108.940.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.03.0006			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah	Laporan	4	18.000.000	4	18.000.000	4	8.940.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah
								RKPD		APBD		P-RKPD		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		X.XX.01.1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Jumlah jenis laporan pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	Laporan	1	6.000.000	1	6.000.000	1	2.803.000	SUB BAGIAN KEUANGAN
		X.XX.01.1.04.0005			Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah	Laporan	4	6.000.000	4	6.000.000	4	2.803.000	SUB BAGIAN KEUANGAN
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	197.000.000	100	197.000.000	100	98.129.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.05.0002			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Paket	0	0	0	0	0	0	
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Dokumen	12	197.000.000	12	197.000.000	12	98.129.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	1.038.000.000	100	1.017.990.000	100	594.504.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	4	50.000.000	4	50.000.000	4	45.593.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	12	78.000.000	12	57.990.000	12	47.567.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	4	60.000.000	4	60.000.000	4	24.052.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Laporan	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	90.000.000	12	90.000.000	12	49.370.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	650.000.000	12	650.000.000	12	325.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Laporan	1	15.000.000	1	15.000.000	1	8.816.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah
								RKPD		APBD		P-RKPD		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen	12	95.000.000	12	95.000.000	12	94.106.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	15	671.600.000	15	651.60.000	7	704.600.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	15	671.600.000	15	651.600.000	7	704.600.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	36	1.344.062.000	36	1.394.072.000	24	1.393.875.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	414.000.000	12	414.000.000	12	414.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	930.062.000	12	980.072.00	12	979.875.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	100	393.645.000	100	383.645.000	84	547.806.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	25	180.000.000	25	180.000.000	23	213.781.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	163.645.000	1	153.645.000	1	295.165.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah
								RKPD		APBD		P-RKPD		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	50	50.000.000	50	50.000.000	60	38.860.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di BPMKP	%	100	632.500.000	100	632.500.000	100	644.796.000	
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah pada BPMKP	Dokumen	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada BPMKP	%	100	74.000.000	100	74.000.000	100	40.086.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	4	12.000.000	4	12.000.000	4	9.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	8.000.000	4	8.000.000	4	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	Paket	4	12.000.000	4	12.000.000	4	4.810.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Laporan	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	18.000.000	12	18.000.000	12	5.976.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	24.000.000	12	24.000.000	12	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada BPMKP	Unit	15	100.000.000	15	100.000.000	4	36.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah
								RKPD		APBD		P-RKPD		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	2	100.000.000	2	100.000.000	4	36.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada BPMKP	Laporan	26	348.500.000	26	348.500.000	24	348.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	186.000.000	12	186.000.000	12	186.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	162.500.000	12	162.500.000	12	162.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada BPMKP	Unit	17	70.000.000	17	70.000.000	13	179.710.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	50.000.000	1	50.000.000	1	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	10	20.000.000	10	20.000.000	12	79.710.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah					Indeks Manajemen Risiko	Angka	2,97	750.000.000	2,97	750.000.000	2,91	320.901.000	Dinas Ketahanan Pangan
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	100	750.000.000	100	750.000.000	100	320.901.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah
								RKPD		APBD		P-RKPD		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		X.XX.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan Daerah	%	100	750.000.000	100	750.000.000	100	320.901.000	SUB BAGIAN PROGRAM
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	7	380.000.000	7	380.000.000	7	225.637.000	SUB BAGIAN PROGRAM
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	18	370.000.000	18	370.000.000	18	95.264.000	SUB BAGIAN PROGRAM
Mewujudkan Ketahanan Pangan Jawa Tengah (I)						Indeks Ketahanan Pangan	Skor	85,34	12.873.888.000	85,34	12.873.888.000	85,47	17.507.560.000	Dinas Ketahanan Pangan
	Meningkatkan Keterjangkauan / Akses Pangan					Rata-rata deviasi harga pangan strategis (beras)	%	10	7.440.000.000	10	7.440.000.000	8	9.797.969.000	Dinas Ketahanan Pangan
		2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			Persentase komoditas pangan strategis dengan harga efektif sesuai ketentuan yang berlaku	%	55	7.440.000.000	55	7.440.000.000	55	9.797.969.000	
		2.09.03.1.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		PERSENTASE PENINGKATAN KAPASITAS USAHA PADA LEMBAGA USAHA PANGAN MASYARAKAT	%	0	0	0	0	0	0	SEKSI DISTRIBUSI PANGAN
		2.09.03.1.01.0003			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	LEMBAGA USAHA PANGAN MASYARAKAT YANG DIFASILITASI	Kelompok	0	0	0	0	0	0	SEKSI DISTRIBUSI PANGAN
						PERSENTASE PENINGKATAN VOLUME BAHAN PANGAN YANG DIDISTRIBUSIKAN UNTUK STABILISASI HARGA	%	4	1.500.000.000	4	1.500.000.000	120	3.907.969.000	SEKSI DISTRIBUSI PANGAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah
								RKPD		APBD		P-RKPD		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		2.09.03.1.01.0003			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	JUMLAH DOKUMEN PELAKSANAAN DISTRIBUSI PANGAN MELALUI SISTEM LOGISTIK DAERAH	Dokumen	12	500.000.000	12	500.000.000	12	356.769.000	SEKSI DISTRIBUSI PANGAN
						VOLUME BAHAN PANGAN YANG DIFASILITASI PENDISTRIBUSIANNYA UNTUK STABILISASI PASOKAN	Ton	700	1.000.000.000	700	1.000.000.000	2450	3.551.200.000	SEKSI DISTRIBUSI PANGAN
						PROSENTASE SASARAN STABILISASI HARGA SESUAI DENGAN SOP	%	100	5.940.000.000	100	5.940.000.000	100	5.890.000.000	SEKSI HARGA PANGAN
		2.09.03.1.01.0009			Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	JUMLAH INFORMASI HARGA PANGAN	Dokumen	12	190.000.000	12	190.000.000	12	140.000.000	SEKSI HARGA PANGAN
						JUMLAH INTERVENSI HARGA PANGAN	Paket	3	5.750.000.0	3	5.750.000.000	5	5.750.000.000	SEKSI HARGA PANGAN
	Meningkatkan Ketersediaan Pangan					Angka Kecukupan Energi	kcal/kapita/hari	3801	5.433.888.000	3801	5.433.888.000	3600	7.709.591.000	Dinas Ketahanan Pangan
		2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			Rasio cadangan pangan masyarakat	Angka	0	0	0	0	0	0	
		2.09.03.1.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi		PERSENTASE PENYALURAN CADANGAN PANGAN MASYARAKAT	%	0	0	0	0	0	0	SEKSI CADANGAN PANGAN
		2.09.03.1.02.0005		Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi		LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT YANG DIFASILITASI/DIBINA	Kelompok	0	0	0	0	0	0	SEKSI CADANGAN PANGAN
						Rasio penyediaan cadangan pangan pemerintah provinsi	Angka	0,38	5.333.888.000	0,38	5.333.888.000	0,45	7.651.621.000	
		2.09.03.1.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi		PERSENTASE PENINGKATAN VOLUME CADANGAN PANGAN PEMERINTAH PROVINSI	%	10	5.333.888.000	10	5.333.888.000	20	7.651.621.000	SEKSI CADANGAN PANGAN
		2.09.03.1.02.0005		Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi		JUMLAH CADANGAN PANGAN PEMERINTAH YANG DIKELOLA	Ton	350	5.333.888.000	350	5.333.888.000	420	7.651.621.000	SEKSI CADANGAN PANGAN
						Rata-rata ketercukupan pangan	Angka	1,25	100.000.000	1,25	100.000.000	1,25	57.970.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah
								RKPD		APBD		P-RKPD		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		2.09.03.1.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		JUMLAH DOKUMEN REKOMENDASI KETERSEDIAAN PANGAN YANG DIUSULKAN	Dokumen	1	100.000.000	1	100.000.000	1	57.970.000	SEKSI DISTRIBUSI PANGAN
		2.09.03.1.01.0013			Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	JUMLAH LAPORAN KETERSEDIAAN PANGAN YANG DISUSUN	Dokumen	12	100.000.000	12	100.000.000	12	57.970.000	SEKSI DISTRIBUSI PANGAN
Mewujudkan Ketahanan Pangan Jawa Tengah (PE)						Indeks Ketahanan Pangan	Skor	85,34	7.980.000.000	85,34	19.980.000.000	85,47	10.281.023.000	Dinas Ketahanan Pangan
	Meningkatkan Keterjangkauan / Akses Pangan					Persentase penanganan kecamatan rawan pangan	%	6	4.055.000.000	6	4.055.000.000	12	7.130.334.000	Dinas Ketahanan Pangan
		2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			Angka konsumsi beras Provinsi Jawa Tengah (DRP)	kg/kapita/tahun	87,7	125.000.000	87,7	125.000.000	87,7	74.399.000	
		2.09.03.1.04		Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi		PPH KAB/KOTA > 87 (DRP)	Angka	34	125.000.000	34	125.000.000	34	74.399.000	SEKSI KONSUMSI PANGAN
		2.09.03.1.04.0002			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	JUMLAH DESA B2SA DI DAERAH RAWAN PANGAN YANG DIFASILITASI	Desa	5	125.000.000	5	125.000.000	5	74.399.000	SEKSI KONSUMSI PANGAN
						Rasio cadangan pangan masyarakat (DRP)	Angka	0	0	0	0	0	0	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah
								RKPD		APBD		P-RKPD		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		2.09.03.1.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi		PERSENTASE PENYALURAN CADANGAN PANGAN MASYARAKAT (DMP)	%	0	0	0	0	0	0	SEKSI CADANGAN PANGAN
		2.09.03.1.02.0005			Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT DI DESA RAWAN PANGAN YANG DIFASILITASI/DIBINA	Kelompok	0	0	0	0	0	0-	SEKSI CADANGAN PANGAN
		2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			Persentase penurunan daerah rawan pangan dan gizi	%	0,01	3.930.000.000	0,01	3.930.000.000	0,01	7.055.935.000	
		2.09.04.1.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi		PERSENTASE PENANGANAN DESA RAWAN PANGAN DAN GIZI	%	5,5	3.930.000.000	5,5	3.930.000.000	5,5	7.055.935.000	SEKSI KERAWANAN PANGAN
		2.09.04.1.02.0004			Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	JUMLAH DESA RAWAN PANGAN DAN GIZI YANG DIFASILITASI	Desa	12	3.360.000.000	12	3.360.000.000	30	6.769.192.000	SEKSI KERAWANAN PANGAN
						JUMLAH DESA STUNTING YANG DIINTERVENSI	Desa	24	50.000.000	24	50.000.000	40	22.593.000	SEKSI KERAWANAN PANGAN
						JUMLAH PETA FSVA YANG DISUSUN	Dokumen	1	50000.000	1	50.000.000	1	10.012.000	SEKSI KERAWANAN PANGAN
						JUMLAH REKOMENDASI KEBUTUHAN KERAWANAN PANGAN LINTAS SEKTOR	Dokumen	1	20.000.000	1	20.000.000	1	2.985.000	SEKSI KERAWANAN PANGAN
						TERSUSUNNYA DOKUMEN MENEJEMEN FOOD LOSS DAN ATAU FOOD WASTE	Dokumen	1	400.000.000	1	400.000.000	1	226.835.000	SEKSI KERAWANAN PANGAN
						TERSUSUNNYA PETA KEWASPADAAN PANGAN DAN GIZI	Dokumen	12	50.000.000	12	50.000.000	12	24.318.000	SEKSI KERAWANAN PANGAN
	Meningkatkan Pemanfaatan Pangan					Skor PPH provinsi	Skor	95,2	3.925.000.000	95,2	15.925.000.000	94,2	3.150.689.000	Dinas Ketahanan Pangan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah
								RKPD		APBD		P-RKPD		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			Angka konsumsi beras Provinsi Jawa Tengah	kg/kapita/tahun	87,7	1.625.000.000	87,7	1.625.000.000	87,7	1.321.566.000	
		2.09.03.1.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		REKOMENDASI KETERSEDIAAN SUMBERDAYA PANGAN LOKAL YANG DISUSUN	Dokumen	1	750.000.000	1	750.000.000	1	894.057.000	SEKSI PENGEMBANGAN PANGAN LOKAL
		2.09.03.1.01.0002			Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	JUMLAH KELOMPOK / PELAKU USAHA PENGEMBANGAN PANGAN OLAHAN LOKAL DAN PANGAN POKOK LOKAL YANG DIFASILITASI	Kelompok	10	750.000.000	10	750.000.000	12	894.057.000	SEKSI PENGEMBANGAN PANGAN LOKAL
		2.09.03.1.04		Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi		PPH Kab / Kota > 87	Angka	34	875.000.000	34	875.000.000	34	427.509.000	SEKSI PROMOSI PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN
		2.09.03.1.04.0001			Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah lokasi yang diberikan promosi/edukasi B2SA dan pangan lokal	Lokasi	6	410.000.000	6	410.000.000	4	192.385.000	SEKSI PROMOSI PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN
						Jumlah Paket Bahan Pangan Lokal Yang Dibagikan / Dibantukan	Paket	650	100.000.000	650	100.000.000	500	70.000.000	SEKSI PROMOSI PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah
								RKPD		APBD		P-RKPD		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		2.09.03.1.04.0002			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	JUMLAH DESA B2SA YANG DIFASILITASI	Desa	5	125.000.000	5	125.000.000	5	95.500.000	SEKSI PROMOSI PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN
						JUMLAH DOKUMEN ANALISIS PPH	Dokumen	1	240.000.000	1	240.000.000	1	69.624.000	SEKSI PROMOSI PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN
		2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan	%	92	2.300.000.000	92	14.300.000.000	90	1.829.123.000	
		2.09.05.1.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		JUMLAH DOKUMEN REKOMENDASI KEAMANAN PANGAN SEGAR YANG DISUSUN*	Dokumen	1	580.000.000	1	580.000.000	1	589.672.000	
		2.09.05.1.01.0011			Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	JUMLAH MASYARAKAT YANG TEREDUKASI TENTANG MUTU DAN KEAMANAN PANGAN	Orang	200	280.000.000	200	280.000.000	250	144.813.000	SEKSI KERJASAMA DAN INFORMASI KEAMANAN PANGAN
						JUMLAH SAMPEL PANGAN SEGAR YANG DIAWASI	sampel	160	300.000.000	160	300.000.000	500	444.859.000	SEKSI PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
						Persentase produk pangan segar teregistrasi yang diawasi di peredaran	%	67	50.000.000	67	50.000.000	67	14.877.000	SEKSI PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
		2.09.05.1.01.0011			Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	JUMLAH LOKASI PENGAWASAN IJIN EDAR	Lokasi	42	50.000.000	42	50.000.000	20	14.877.000	SEKSI PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
						PROSENTASE KELOMPOK / PELAKU USAHA YANG PENERAPAN HIGIENE SANITASINYA MENINGKAT LEVELNYA	%	20	370.000.000	20	370.000.000	20	174.316.000	SEKSI KELEMBAGAAN KEAMANAN PANGAN
		2.09.05.1.01.0009			Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah kelompok yang didampingi dalam penyusunan doksistu	Kelompok	4	165.000.000	4	165.000.000	3	71.085.000	SEKSI KELEMBAGAAN KEAMANAN PANGAN
						JUMLAH PELAKU USAHA YANG DIBINA DALAM PENERAPAN HIGIENE SANITASI	Kelompok	20	205.000.000	20	205.000.000	20	103.231.000	SEKSI KELEMBAGAAN KEAMANAN PANGAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah
								RKPD		APBD		P-RKPD		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
						Persentase rekomendasi jaminan mutu dan keamanan pangan yang diterbitkan	%	80	1.300.000.000	80	13.300.000.000	80	1.050.258.000	
		2.09.05.1.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah sertifikat jaminan mutu dan keamanan pangan pada balai	Dokumen	2	1.300.000.000	2	13.300.000.000	2	1.050.258.000	SEKSI STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI PANGAN
		2.09.05.1.01.0006			Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah dokumen sertifikat dan/atau registrasi yang diterbitkan	Dokumen	35	650.000.000	35	650.000.000	50	266.978.000	SEKSI STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI PANGAN
		2.09.05.1.01.0010			Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Sampel Pangan yang Diuji	sampel	90	650.000.000	90	12.650.000.000	90	783.280.000	SEKSI STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI PANGAN

Tabel 3.2 Manajemen Risiko Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Tujuan PD	Mewujudkan Ketahanan Pangan Jawa Tengah	Indeks Ketahanan Pangan	Rendahnya aspek ketersediaan pangan, aspek keterjangkauan pangan, dan aspek pemanfaatan pangan (Nilai Indeks di bawah 74,4)	Strategis Pemda	Pangan tidak tersedia secara cukup, tidak merata di seluruh daerah, konsumsi masyarakat tidak memenuhi pola beragam bergizi seimbang dan aman	Tingginya gejolak ekonomi dan sosial, tingginya inflasi, menurunnya kesehatan masyarakat	Masyarakat Jawa Tengah
		Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Proses reformasi yang tidak terkoordinasi dengan baik	Operasional OPD	Kurangnya pemahaman yang jelas tentang apa yang ingin dicapai dengan reformasi sehingga menyebabkan kebingungan dan ketidaksesuaian antara berbagai langkah yang diambil	Upaya reformasi menjadi tidak terarah dan tersebar	Dishanpan Prov. Jateng
2	Sasaran Strategis PD	Meningkatnya Ketersediaan Pangan	Angka Kecukupan Energi	Angka Kecukupan Energi Jawa Tengah tidak terpenuhi	Strategis OPD	Tidak tercukupinya ketersediaan pangan Jawa Tengah untuk komoditas pangan hewani, sayur dan buah	Energi/Kalori masyarakat tidak cukup untuk hidup sehat, aktif dan produktif	Masyarakat Jawa Tengah
		Meningkatnya Keterjangkauan /Akses Pangan	Rata-rata deviasi harga pangan strategis (beras)	Harga komoditas pangan strategis mengalami fluktuasi tajam	Strategis OPD	Panjangnya rantai distribusi pangan	Disparitas harga antara konsumen dan produsen	Masyarakat Jawa Tengah
		Meningkatnya Keterjangkauan /Akses Pangan	Prosentase penanganan desa rawan pangan dan gizi di Jawa	Bertambahnya daerah rawan pangan	Strategis OPD	Desa Rawan Pangan belum tertangani secara maksimal, Intervensi hanya berupa bantuan	Desa Rawan Pangan yang ditangani belum dapat naik ke level prioritas yang lebih tinggi	Desa rawan pangan

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Tengah			pangan, dan bersifat sesaat sehingga belum berpengaruh terhadap aspek yang lain		
		Meningkatnya Pemanfaatan Pangan	Skor PPH Provinsi	Skor PPH Provinsi mengalami penurunan	Strategis OPD	Pemahaman masyarakat tentang pola konsumsi pangan dengan kaidah B2SA belum tersebar secara optimal	Masyarakat Jawa Tengah masih terbiasa dengan pola konsumsi pangan yang kurang beragam serta bergantung pada beberapa komoditas strategis saja	Masyarakat Jawa Tengah
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Pelayanan publik yang disediakan tidak memenuhi harapan atau kebutuhan masyarakat	Operasional OPD	Tidak responsif terhadap perubahan sosial, ekonomi, atau teknologi sehingga mengalami kesulitan dalam menyediakan layanan yang berkualitas	Penurunan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Masyarakat akan merasa tidak terlayani dengan baik	Dishanpan Prov. Jateng
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah	Indeks Manajemen Risiko	Belum semua Indikator dilakukan analisa risiko	Operasional OPD	elaksana kegiatan kurang teliti dalam menganalisa risiko	Menurunnya Indeks Manajemen Risiko	Dishanpan Prov. Jateng
3	Program	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan	Angka Konsumsi Beras Provinsi Jawa Tengah (DRP)	Angka konsumsi beras diatas angka ideal	Operasional OPD	Pengembangan pangan lokal sebagai alternatif pengganti komoditas beras belum berkembang dan dikenal secara optimal di masyarakat	ketersediaan bahan pangan alternatif pengganti beras di masyarakat masih minim	Masyarakat Jawa Tengah
			Angka Konsumsi Beras Provinsi Jawa Tengah	Angka konsumsi beras diatas angka ideal	Operasional OPD	Pengembangan pangan lokal sebagai alternatif pengganti komoditas beras belum berkembang dan dikenal secara	ketersediaan bahan pangan alternatif pengganti beras di masyarakat masih minim	Masyarakat Jawa Tengah

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						optimal di masyarakat		
			Rasio Penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Tidak terpenuhinya cadangan pangan minimal	Operasional OPD	Kurang optimalnya sarpras penunjang pemenuhan kebutuhan cadangan pangan minimal pemerintah	Kekurangan cadangan pangan pemerintah provinsi	Masyarakat Jawa Tengah
			Rata-Rata Ketercukupan Pangan	Pangan Strategis di masing-masing wilayah Jawa Tengah tidak tercukupi	Operasional OPD	Akses Pangan dan distribusi kurang maksimal	Kecukupan Pangan di tingkat Rumah Tangga tidak terpenuhi	Masyarakat Jawa Tengah
			Persentase Komoditas Pangan Startegis Dengan Harga Efektif Sesuai Ketentuan Yang Berlaku	Kenaikan harga beras disesuaikan dengan HET yang baru sesuai Perbadan	Operasional OPD	Memasuki masa panen bulan Februari s.d. April petani mengalami puso dikarenakan bencana alam	Permintaannya banyak, produksi sedikit, sehingga harga menjadi mahal dan beras Jawa Tengah banyak yang ke luar daerah.	Masyarakat Jawa Tengah
4	Kegiatan	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi	PPH KAB/KOTA > 87 (DRP)	Skor PPH Kab/Kota tidak tercapai sesuai target	Operasional OPD	Kabupaten/Kota tidak memiliki analisis masalah yang relevan dengan variabel pada penghitungan PPH	Langkah promotif dan intervensi yang dilakukan kurang efektif	Masyarakat Jawa Tengah
			PPH Kab / Kota > 87	Skor PPH Kab/Kota tidak tercapai sesuai target	Operasional OPD	Kabupaten/Kota tidak memiliki analisis masalah yang relevan dengan variabel pada penghitungan PPH	Langkah promotif dan intervensi yang dilakukan kurang efektif	Masyarakat Jawa Tengah
5	Kegiatan	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam	Rekomendasi Ketersediaan Sumberdaya Pangan Lokal Yang Disusun	Dokumen rekomendasi ketersediaan sumber daya pangan lokal tidak tersusun	Operasional OPD	belum tersedianya data dan informasi potensi ketersediaan pangan lokal dan pelaku usaha pangan lokal di Jawa	Informasi pengembangan pangan lokal tidak tersedia	Masyarakat Jawa Tengah

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan				Tengah		
			Persentase Peningkatan Kapasitas Usaha Pada Lembaga Usaha Pangan Masyarakat	Tidak berjalannya Lembaga Usaha Pangan Masyarakat yang Difasilitasi	Operasional OPD	Fasilitasi dari pemerintah tidak sesuai dengan kebutuhan	Pendapatan Lembaga Usaha Pangan Masyarakat tidak meningkat	Lembaga Usaha Pangan Masyarakat yang difasilitasi
			Persentase Peningkatan Volume Bahan Pangan Yang Didistribusikan Untuk Stabilisasi Harga	Akses Pangan Masyarakat Terganggu	Operasional OPD	Tidak semua wilayah memiliki sumber pangan strategis, Pendistribusian bahan pangan tidak dapat menjangkau semua wilayah Jawa Tengah	Harga pangan fluktuatif	Masyarakat Jawa Tengah
			Prosentase Sasaran Stabilisasi Harga Sesuai Dengan SOP	Masih ada disparitas/ volatile harga pangan strategis	Operasional OPD	Intervensi harga pangan belum optimal	Kerugian bagi produsen saat harga jatuh dan keterjangkauan di tingkat konsumen saat terjadi kenaikan harga secara signifikan.	Masyarakat Jawa Tengah
				Pelaksanaan kegiatan Stabilisasi Harga belum sesuai SOP	Kemitraan	Keterbatasan dalam melaksanakan monev di lapangan	Pelaksanaan kegiatan Stabilisasi Harga tidak sesuai sasaran dan tujuan kegiatan tidak dapat tercapai secara optimal.	Masyarakat Jawa Tengah
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Ketersediaan Pangan Yang Diusulkan	Rekomendasi Ketersediaan Pangan yang diusulkan tidak sesuai dengan kondisi di lapangan	Operasional OPD	Data yang tersedia tidak update	Pangan tidak tersedia secara merata sepanjang tahun di wilayah Jawa Tengah	Masyarakat Jawa Tengah
6	Kegiatan	Pengelolaan dan	Persentase	Tidak	Operasional OPD	Kurang optimalnya	Kekurangan	Masyarakat Jawa

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Peningkatan Volume Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	terpenuhinya cadangan pangan minimal		sarpras penunjang pemenuhan kebutuhan cadangan pangan minimal pemerintah	cadangan pangan pemerintah provinsi	Tengah
7	Program	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Rekomendasi Jaminan Mutu Dan Keamanan Pangan Yang Diterbitkan	Ketidakpatuhan pelaku usaha terhadap jaminan mutu dan keamanan yang telah diterbitkan	Operasional OPD	Kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk mematuhi jaminan mutu dan keamanan yang telah diterbitkan	Produk yang telah teregistrasi tidak sesuai dengan jaminan mutu dan keamanan yang diterbitkan	Masyarakat Jawa Tengah
			Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan Yang Memenuhi Syarat Keamanan Dan Mutu Pangan	Pangan yang beredar di masyarakat tidak sesuai dengan syarat keamanan dan mutu pangan	Kepatuhan	Kurangnya pemahaman Pelaku Usaha dan Pengawasan PSAT terhadap keamanan dan mutu pangan	Adanya aduan dari Masyarakat, Kesehatan Masyarakat terganggu	Masyarakat Jawa Tengah
8	Kegiatan	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Yang Disusun	Rekomendasi tidak diditindaklanjuti pelaku usaha	Operasional OPD	Pelaku usaha yang tidak patuh terhadap aturan yang berlaku	Kesehatan masyarakat terganggu	Masyarakat Jawa Tengah
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Yang Disusun	Rekomendasi tidak diditindaklanjuti instansi lain	Operasional OPD	Instansi lain memiliki prioritas kegiatan yang berbeda dengan yang direkomendasikan	Kesehatan masyarakat terganggu	Masyarakat Jawa Tengah
			Persentase Produk Pangan Segar Yang Teregistrasi Di Peredaran	Ditemukan produk pangan segar di peredaran yang belum teregistrasi	Operasional OPD	Pelaku usaha yang tidak patuh terhadap aturan yang berlaku	Produk pangan segar di peredaran belum terjamin mutu dan keamanan pangannya	Masyarakat Jawa Tengah
			Prosentase Kelompok / Pelaku Usaha	Kelompok/ pelaku usaha belum memahami prinsip	Operasional OPD	Keterbatasan jumlah petugas dan narasumber	PSAT yang beredar di Jawa Tengah belum aman	Masyarakat Jawa Tengah

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Yang Penerapan Higiene Sanitasinya Meningkatkan Levelnya	higiene sanitasi penanganan pangan				
			Jumlah sertifikat jaminan mutu dan keamanan pangan pada balai	Adanya aduan masyarakat/pelaku u usaha terkait pelayanan sertifikat jaminan mutu dan keamanan pangan	Operasional OPD	SDM Tidak menjalankan pelayanan sesuai dengan SOP	Rendahnya pengajuan Registrasi dan uji mutu pangan oleh Pelaku usaha	Masyarakat Jawa Tengah
10	Program	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Presentase Penurunan Daerah Rawan Pangan Dan Gizi	Bertambahnya daerah rawan pangan maksimal	Operasional OPD	Desa Rawan Pangan belum tertangani secara maksimal, Intervensi hanya berupa bantuan pangan, dan bersifat sesaat sehingga belum berpengaruh terhadap aspek yang lain	Desa Rawan Pangan yang ditangani belum dapat naik ke level prioritas yang lebih tinggi	Desa rawan pangan
11	Kegiatan	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Persentase Penanganan Desa Rawan Pangan Dan Gizi	Bantuan pangan tidak sesuai spesifikasi	Fraud	Adanya mark-up harga pada saat pengadaan bantuan pangan	Menurunnya kualitas bantuan pangan yang diterima masyarakat, adanya aduan masyarakat	Desa rawan pangan
12	Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah tidak mencapai standar yang diharapkan	Penunjang OPD	Kurangnya strategi yang jelas dan kurangnya koordinasi antar unit kerja menghambat pencapaian standar yang diharapkan	Menghambat efisiensi dan efektivitas operasi perangkat daerah	Dishanpan
			Persentase tingkat pelayanan umum,	Tidak akuratnya laporan dan data pada pelayanan umum,	Operasional OPD	Data yg disampaikan tidak akurat	Menurunnya tingkat pelayanan umum perangkat daerah di BPMKP	BPMKP

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di BPMKP	kepegawaian, dan keuangan BPMKP				
			Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	Tidak tercapainya beberapa indikator (tujuan, sasaran, kegiatan dan sub kegiatan)	Penunjang OPD	Kurang cermat dan pertimbangan dalam penentuan target	Menurunnya indeks manajemen risiko	Dishanpan
13	Kegiatan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	Menurunnya nilai SAKIP Perangkat Daerah	Penunjang OPD	Tidak sesuai rincian RAB dengan pilihan indikator kegiatan/sub kegiatan Waktu penginputan aplikasi penganggaran yang terbatas/singkat Kurang cermat dan pertimbangan dalam penentuan target	Beberapa kegiatan/sub kegiatan perlu disesuaikan kembali pada anggaran perubahan	Dishanpan
	Kegiatan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Tidak akuratnya penyajian data awal dan tidak terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN	Penunjang OPD	Data yang disampaikan tidak akurat dan sering terjadi perubahan	Penyediaan gaji dan tunjangan tidak tepat waktu, menurunnya kinerja pelaksana kegiatan, dan penyajian laporan yang kurang akuntabel	Dishanpan
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Tidak akuratnya penyajian data pada dokumen administrasi barang milik daerah Dishanpan	Penunjang OPD	Kurangnya ketelitian dalam penatausahaan inventaris barang milik daerah	Penyajian dokumen administrasi barang milik daerah tidak tepat waktu dan kurang akuntabel	Dishanpan
			Jumlah jenis	Tidak akuratnya	Penunjang OPD	Kurang ketelitian	Penyajian dokumen	BPMKP

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah pada BPMKP	penyajian data pada dokumen administrasi barang milik daerah BPMKP		dalam inventaris barang milik daerah	administrasi barang milik daerah tidak tepat waktu dan kurang akuntabel	
		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis laporan pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	Tidak akuratnya penyajian data laporan administrasi pendapatan daerah	Penunjang OPD	Data yang disampaikan tidak akurat	Penyajian data laporan pendapatan yang kurang akuntabel	Dishanpan
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah tidak mencapai standar yang diharapkan	Penunjang OPD	Sistem layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah tidak akurat, dapat terjadi kesalahan dalam pengelolaan data pegawai	Kesalahan dalam pencatatan informasi personal dapat menciptakan ketidakpuasan di antara pegawai	Dishanpan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Layanan tidak sesuai standar, sehingga proses administrasi akan menjadi kurang efisien dan produktif.	Penunjang OPD	Kurangnya standar dalam layanan administrasi umum dapat menyebabkan proses-proses menjadi tidak terstruktur	Kurangnya standar dapat meningkatkan risiko kesalahan dan ketidakakuratan dalam proses administrasi	Dishanpan
			Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada BPMKP	Terdapat gangguan pada sarana dan prasarana kantor maupun gangguan eksternal di BPMKP	Penunjang OPD	Peralatan dan perlengkapan kantor sudah tidak memenuhi syarat untuk melaksanakan kegiatan organisasi	Terjadinya kekurangan peralatan dan perlengkapan kantor untuk di gunakan dalam kegiatan kantor sehari hari	BPMKP

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Perencanaan pengadaan peralatan dan mesin yang tidak sesuai dengan kebutuhan	Penunjang OPD	Kurangnya koordinasi dalam pengadaan peralatan dan mesin	Peralatan dan mesin tidak digunakan secara optimal	Dishanpan
			Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada BPMKP	Pengadaan alat dan bahan laboratorium yang non TKDN tidak disetujui	Penunjang OPD	Pengadaan alat dan bahan laboratorium mayoritas merupakan produk impor	Mengurangi kualitas/kuantitas pelayanan pengujian	BPMKP
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Tidak akuratnya penyajian data pada laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Penunjang OPD	Keterlambatan dalam pendistribusian surat; Kenaikan tarif komunikasi, air dan listrik; Honor pegawai kontrak tidak dapat disesuaikan dengan kinerja	Penyajian laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah tidak tepat waktu dan kurang akuntabel	Dishanpan
			Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada BPMKP	Tidak akuratnya penyajian data pada laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah di BPMKP	Penunjang OPD	Keterlambatan dalam pendistribusian surat; Kenaikan tarif komunikasi, air dan listrik; Honor pegawai kontrak tidak dapat disesuaikan dengan kinerja	Penyajian laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah tidak tepat waktu dan kurang akuntabel	BPMKP
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan	Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor tidak dilaksanakan secara optimal	Penunjang OPD	Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor tidak dilakukan secara optimal dan anggaran tidak	Mengganggu dan menghambat aktivitas pekerjaan kantor	Dishanpan

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan			tersedia dengan cukup		
			Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada BPMKP	Sarana dan prasarana kantor BPMKP banyak yang rusak dan tidak terawat	Penunjang OPD	Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor tidak dilakukan secara optimal dan anggaran	Menggangu dan menghambat aktivitas pekerjaan kantor	BPMKP

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/ Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
Pangan									
Angka konsumsi beras diatas angka ideal	4	3	12	Ada	Pengembangan Pangan Lokal	Memadai	3	3	9
Angka konsumsi beras diatas angka ideal	4	3	12	Ada	Pengembangan Pangan Lokal	Memadai	3	3	9
Tidak terpenuhinya cadangan pangan minimal	4	3	12	Ada	Penitipan cadangan pangan pemerintah provinsi ke Gapoktan	Memadai	3	3	9
Pangan Strategis di masing-masing wilayah Jawa Tengah tidak tercukupi	3	4	12	Ada	Adanya Kegiatan Fasilitasi Distrbusi	Memadai	3	3	9
Kenaikan harga beras disesuaikan dengan HET yang baru sesuai Perbadan	2	3	6	Ada	Fasilitasi distribusi, subsidi harga	Belum Memadai	2	3	6
Kegiatan									
Skor PPH Kab/Kota tidak tercapai sesuai target	4	3	12	Ada	Koordinasi PPH	Belum Memadai	4	3	12
Skor PPH Kab/Kota tidak tercapai sesuai target	4	3	12	Ada	Koordinasi PPH	Belum Memadai	4	3	12
Kegiatan									
Dokumen rekomendasi ketersediaan sumber daya pangan lokal tidal tersusun	4	2	8	Ada	FGD Pengembangan Pangan Lokal	Memadai	3	2	6
Tidak berjalannya Lembaga Usaha Pangan Masyarakat yang Difasilitasi	2	3	6	ada	Identifikasi Kebutuhan Lembaga Usaha Pangan Masyarakat	Memadai	2	2	4
Akses Pangan Masyarakat Terganggu	3	3	9	Ada	Pemantauan ketersediaan dan harga pangan di setiap wilayah secara periodik	Belum memadai	3	3	9
Masih ada disparitas/ volatile harga pangan strategis	3	3	9	Ada	Penyaluran subsidi harga pangan tingkat produsen dan konsumen	Belum memadai	3	3	9
Pelaksanaan kegiatan Stabilisasi Harga belum sesuai SOP	3	3	9	Ada	Penyusunan juknis, melaksanakan monev saat pelaksanaan kegiatan dan evaluasi	Memadai	2	3	6

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/ Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
					setelah kegiatan dilaksanakan				
Rekomendasi Ketersediaan Pangan yang diusulkan tidak sesuai dengan kondisi di lapangan Kegiatan	4	3	12	Ada	Validasi Data secara Periodik	Belum memadai	4	3	12
Tidak terpenuhinya cadangan pangan minimal	3	4	12	ada	Penitipan cadangan pangan pemerintah provinsi ke Gapoktan	Memadai	3	3	9
Program Pengawasan Keamanan Pangan									
Ketidakpatuhan pelaku usaha terhadap jaminan mutu dan keamanan yang telah diterbitkan.	3	3	9	Ada	Surveilan ke pelaku usaha yang telah diterbitkan sertifikat jaminan mutu dan keamanan pangan yang dilakukan setiap tahun	Memadai	2	3	6
Pangan yang beredar di masyarakat tidak sesuai dengan syarat keamanan dan mutu pangan Kegiatan	3	4	12	Ada	Pengawasan dan Pengujian	Memadai	3	3	9
Rekomendasi tidak diditindaklanjuti pelaku usaha	3	4	12	Ada	Sosialisasi dan pembinaan pelaku usaha	Memadai	3	3	9
Rekomendasi tidak diditindaklanjuti instans lain	3	4	12	Ada	koordinasi ke instansi terkait	Memadai	3	3	9
Ditemukan produk pangan segar di peredaran yang belum teregistrasi	2	4	8	Ada	Pengawasan dan pembinaan	Memadai	2	3	6
Kelompok/ pelaku usaha belum memahami prinsip higiene sanitasi penanganan pangan	2	3	6	Ada	Pengawasan dan pembinaan	Memadai	2	2	4
Adanya aduan masyarakat/pelaku usaha terkait pelayanan sertifikat jaminan	3	3	9	Ada	Adanya kegiatan Capicity Building mengeneai Pelayanan	Memadai	3	2	6

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/ Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
mutu dan keamanan pangan					bagi SDM				
Program Penanganan Kerawanan Pangan									
Bertambahnya daerah rawan pangan	4	3	12	Ada	Memberikan intervensi berupa bantuan pangan	Memadai	3	3	9
Kegiatan									
Bantuan pangan tidak sesuai spesifikasi	3	5	15	Ada	Melakukan pemeriksaan bantuan pangan sebelum disalurkan	Memadai	2	5	10
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
Pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah tidak mencapai standar yang diharapkan	2	2	4	Ada	Menggunakan instrumen manajemen kinerja yang memungkinkan pemantauan dan evaluasi kinerja unit kerja serta memberikan umpan balik yang konstruktif untuk perbaikan.	Memadai	1	2	2
Tidak akuratnya laporan dan data pada pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan BPMKP	3	3	9	Ada	Laporan rutin pada pelayanan umum kepegawaian dan keuangan (BPMKP)	Memadai	3	2	6
Tidak tercapainya beberapa indikator (tujuan, sasaran, kegiatan dan sub kegiatan)	2	3	6	Ada	Melaksanakan kegiatan sesuai target	Memadai	2	2	4
Kegiatan									
Menurunnya nilai SAKIP Perangkat Daerah	2	3	6	Ada	Melaksanakan kegiatan sesuai dengan target	Memadai	2	2	4
Kegiatan									
Tidak akuratnya penyajian data awal dan tidak terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN	3	5	15	Ada	Menyediakan formulir/isian data dan melaksanakan sinkronisasi serta koordinasi antar bidang,	Memadai	2	3	6

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/ Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
					balai dan sekretariat				
Kegiatan									
Tidak akuratnya penyajian data pada dokumen administrasi barang milik daerah	3	3	9	Ada	Evaluasi berkala terhadap penatausahaan inventaris barang milik daerah	Memadai	3	2	6
Tidak akuratnya penyajian data pada dokumen administrasi barang milik daerah BPMKP	3	3	9	Ada	Laporan rutin administrasi barang milik daerah BPMKP	Memadai	3	2	6
Kegiatan									
Tidak akuratnya penyajian data laporan administrasi pendapatan daerah	2	4	8	Ada	Menyediakan formulir/isian data dan melaksanakan sinkronisasi serta koordinasi antar bidang, balai dan sekretariat	Memadai	1	2	2
Kegiatan									
Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah tidak mencapai standar yang diharapkan	2	3	6	Ada	Evaluasi rutin terhadap proses-proses administrasi kepegawaian untuk mengidentifikasi potensi masalah atau ketidaksesuaian dengan standar layanan yang telah ditetapkan	Memadai	1	2	2
Kegiatan									
Layanan tidak sesuai standar, sehingga proses administrasi akan menjadi kurang efisien dan produktif.	2	2	4	Ada	Telah mengembangkan standar yang jelas untuk setiap aspek layanan administrasi umum	Memadai	1	2	2
Terdapat gangguan pada sarana dan prasarana kantor maupun gangguan eksternal di BPMKP	3	3	9	Ada	Koordinasi dengan Instansi terkait	Memadai	2	3	6
Kegiatan									
Perencanaan pengadaan peralatan dan mesin yang tidak	2	3	6	Ada	Koordinasi dengan bagian perencanaan	Memadai	2	2	4

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/ Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
sesuai dengan kebutuhan					dan bidang				
Pengadaan alat dan bahan laboratorium yang non TKDN tidak disetujui	3	4	12	Ada	Pembuatan ijin belanja barang non TKDN dilakukan dari awal tahun anggaran	Memadai	3	2	6
Kegiatan									
Tidak akuratnya penyajian data pada laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	3	3	9	Ada	Laporan Rutin penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Memadai	2	3	6
Tidak akuratnya penyajian data pada laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah di BPMKP	3	3	9	Ada	Laporan Rutin penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (BPMKP)	Memadai	2	3	6
Kegiatan									
Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor tidak dilaksanakan secara optimal	2	3	6	Ada	Optimalisasi pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	Memadai	2	2	4
Sarana dan prasarana kantor BPMKP banyak yang rusak dan tidak terawat	2	3	6	Ada	Pemeliharaan Rutin	Memadai	2	2	4

Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak
1	2	3	4	5
Tujuan				
Rendahnya aspek ketersediaan pangan, aspek keterjangkauan pangan, dan aspek pemanfaatan pangan (Nilai Indeks di bawah 74,4)	12	Kepala Dinas	Pangan tidak tersedia secara cukup, tidak merata di seluruh daerah, konsumsi masyarakat tidak memenuhi pola beragam bergizi seimbang dan aman	Tingginya gejolak ekonomi dan sosial, tingginya inflasi, menurunnya kesehatan masyarakat
Sasaran				
Angka Kecukupan Energi Jawa Tengah tidak terpenuhi	9	Kepala Dinas	Tidak tercukupinya ketersediaan pangan Jawa Tengah untuk komoditas pangan hewani, sayur dan buah	Energi/Kalori masyarakat tidak cukup untuk hidup sehat, aktif dan produktif
Harga komoditas pangan strategis mengalami fluktuasi tajam	12	Kepala Dinas	Panjangnya rantai distribusi pangan	Disparitas harga antara konsumen dan produsen
Bertambahnya daerah rawan pangan	9	Kepala Dinas	Desa Rawan Pangan belum tertangani secara maksimal, Intervensi hanya berupa bantuan pangan, dan bersifat sesaat sehingga belum berpengaruh terhadap aspek yang lain	Desa Rawan Pangan yang ditangani belum dapat naik ke level prioritas yang lebih tinggi
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan				
Angka konsumsi beras diatas angka ideal	9	Bidang Panganekaragaman Konsumsi Pangan	Pengembangan pangan lokal sebagai alternatif pengganti komoditas beras belum berkembang dan dikenal secara optimal di masyarakat	ketersediaan bahan pangan alternatif pengganti beras di masyarakat masih minim
Angka konsumsi beras diatas angka ideal	9	Bidang Panganekaragaman Konsumsi Pangan	Pengembangan pangan lokal sebagai alternatif pengganti komoditas beras belum berkembang dan dikenal secara optimal di masyarakat	ketersediaan bahan pangan alternatif pengganti beras di masyarakat masih minim
Tidak terpenuhinya cadangan pangan minimal	9	Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan	Kurang optimalnya sarpras penunjang pemenuhan kebutuhan cadangan pangan	Kekurangan cadangan pangan pemerintah provinsi

Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak
1	2	3	4	5
			minimal pemerintah	
Pangan Strategis di masing-masing wilayah Jawa Tengah tidak tercukupi	9	Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan	Akses Pangan dan distribusi kurang maksimal	Kecukupan Pangan di tingkat Rumah Tangga tidak terpenuhi
Kegiatan				
Skor PPH Kab/Kota tidak tercapai sesuai target	12	Bidang Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Kabupaten/Kota tidak memiliki analisis masalah yang relevan dengan variabel pada penghitungan PPH	Langkah promotif dan intervensi yang dilakukan kurang efektif
Skor PPH Kab/Kota tidak tercapai sesuai target	12	Bidang Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Kabupaten/Kota tidak memiliki analisis masalah yang relevan dengan variabel pada penghitungan PPH	Langkah promotif dan intervensi yang dilakukan kurang efektif
Akses Pangan Masyarakat Terganggu	9	Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan	Tidak semua wilayah memiliki sumber pangan strategis, Pendistribusian bahan pangan tidak dapat menjangkau semua wilayah Jawa Tengah	Harga pangan fluktuatif
Masih ada disparitas/ volatile harga pangan strategis	9	Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan	Intervensi harga pangan belum optimal	Kerugian bagi produsen saat harga jatuh dan keterjangkauan di tingkat konsumen saat terjadi kenaikan harga secara signifikan.
Rekomendasi Ketersediaan Pangan yang diusulkan tidak sesuai dengan kondisi di lapangan	12	Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan	Data yang tersedia tidak update	Pangan tidak tersedia secara merata sepanjang tahun di wilayah Jawa Tengah
Tidak terpenuhinya cadangan pangan minimal	9	Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan	Kurang optimalnya sarpras penunjang pemenuhan kebutuhan cadangan pangan minimal pemerintah	Kekurangan cadangan pangan pemerintah provinsi
Program Pengawasan Keamanan Pangan				
Pangan yang beredar di masyarakat tidak sesuai dengan syarat keamanan dan mutu pangan	9	Bidang Keamanan Pangan	Kurangnya pemahaman Pelaku Usaha dan Pengawasan PSAT terhadap keamanan dan mutu pangan	Adanya aduan dari Masyarakat, Kesehatan Masyarakat terganggu

Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak
1	2	3	4	5
Kegiatan				
Rekomendasi tidak ditindaklanjuti pelaku usaha	9	Bidang Keamanan Pangan	Pelaku usaha yang tidak patuh terhadap aturan yang berlaku	Kesehatan masyarakat terganggu
Rekomendasi tidak ditindaklanjuti instansi lain	9	Bidang Keamanan Pangan	Instansi lain memiliki prioritas kegiatan yang berbeda dengan yang direkomendasikan	Kesehatan masyarakat terganggu
Program Penanganan Kerawanan Pangan				
Bertambahnya daerah rawan pangan maksimal	9	Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi	Desa Rawan Pangan belum tertangani secara maksimal, Intervensi hanya berupa bantuan pangan, dan bersifat sesaat sehingga belum berpengaruh terhadap aspek yang lain	Desa Rawan Pangan yang ditangani belum dapat naik ke level prioritas yang lebih tinggi
Kegiatan				
Bantuan pangan tidak sesuai spesifikasi	10	Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi	Adanya mark-up harga pada saat pengadaan bantuan pangan	Menurunnya kualitas bantuan pangan yang diterima masyarakat, adanya aduan masyarakat

Tabel 3.3 Identifikasi, Analisis Risiko Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tujuan								
Mewujudkan Ketahanan Pangan Jawa Tengah	Indeks Ketahanan Pangan	Rendahnya aspek ketersediaan pangan, aspek keterjangkauan pangan, dan aspek pemanfaatan pangan (Nilai Indeks di bawah 74,4)	12	Pangan tidak tersedia secara cukup, tidak merata di seluruh daerah, konsumsi masyarakat tidak memenuhi pola beragam bergizi seimbang dan aman	Tingginya gejolak ekonomi dan sosial, tingginya inflasi, menurunnya kesehatan masyarakat	Memastikan ketersediaan stok pangan daerah, kemudahan akses, peningkatan mutu pangan, edukasi promosi pangan B2SA	Kepala Dinas	2025
SASARAN								
Meningkatnya Ketersediaan Pangan	Angka Kecukupan Energi	Angka Kecukupan Energi Jawa Tengah tidak terpenuhi	9	Tidak tercukupinya ketersediaan pangan Jawa Tengah untuk komoditas pangan hewani, sayur dan buah	Energi/Kalori masyarakat tidak cukup untuk hidup sehat, aktif dan produktif	Penyediaan pangan merata di seluruh daerah	Kepala Dinas	2025
Meningkatnya Keterjangkauan /Akses Pangan	Rata-rata deviasi harga pangan strategis (beras)	Harga komoditas pangan strategis mengalami fluktuasi tajam	12	Panjangnya rantai distribusi pangan	Disparitas harga antara konsumen dan produsen	Pengendalian harga melalui pemantauan dan intervensi harga	Kepala Dinas	2025

Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya Keterjangkauan /Akses Pangan	Prosentase penanganan desa rawan pangan dan gizi di Jawa Tengah	Bertambahnya daerah rawan pangan	9	Desa Rawan Pangan belum tertangani secara maksimal, Intervensi hanya berupa bantuan pangan, dan bersifat sesaat sehingga belum berpengaruh terhadap aspek yang lain	Desa Rawan Pangan yang ditangani belum dapat naik ke level prioritas yang lebih tinggi	Memberikan intervensi berupa bantuan pangan	Kepala Dinas	2024 - 2026
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan								
	Angka Konsumsi Beras Provinsi Jawa Tengah (DRP)	Angka konsumsi beras diatas angka ideal	9	Pengembangan pangan lokal sebagai alternatif pengganti komoditas beras belum berkembang dan dikenal secara optimal di masyarakat	ketersediaan bahan pangan alternatif pengganti beras di masyarakat masih minim	Fasilitasi Kelompok/Pelaku Usaha Pengolahan Pangan Lokal	Bidang Penganekaragama n Konsumsi Pangan	Desember 2026
	Angka Konsumsi Beras Provinsi Jawa Tengah	Angka konsumsi beras diatas angka ideal	9	Pengembangan pangan lokal sebagai alternatif pengganti komoditas beras belum berkembang dan	ketersediaan bahan pangan alternatif pengganti beras di masyarakat masih minim	Fasilitasi Kelompok/Pelaku Usaha Pengolahan Pangan Lokal	Bidang Penganekaragama n Konsumsi Pangan	Desember 2026

Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				dikenal secara optimal di masyarakat				
	Rasio Penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Tidak terpenuhinya cadangan pangan minimal	9	Kurang optimalnya sarpras penunjang pemenuhan kebutuhan cadangan pangan minimal pemerintah	Kekurangan cadangan pangan pemerintah provinsi	Penitipan cadangan pangan pemerintah provinsi ke Gapoktan	Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan	Desember 2025
	Rata-Rata Ketercukupan Pangan	Pangan Strategis di masing-masing wilayah Jawa Tengah tidak tercukupi	9	Akses Pangan dan distribusi kurang maksimal	Kecukupan Pangan di tingkat Rumah Tangga tidak terpenuhi	Adanya Kegiatan Fasilitasi Distribusi	Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan	2025
KEGIATAN								
Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi	PPH KAB/KOTA > 87 (DRP)	Skor PPH Kab/Kota tidak tercapai sesuai target	12	Kabupaten/Kota tidak memiliki analisis masalah yang relevan dengan variabel pada penghitungan PPH	Langkah promotif dan intervensi yang dilakukan kurang efektif	Koordinasi dengan Bapanas dan BPS guna menganalisis variabel pembentuk skor PPH di Kabupaten/Kota se Jawa Tengah	Bidang Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Desember 2025
	PPH Kab / Kota > 87	Skor PPH Kab/Kota tidak tercapai sesuai target	12	Kabupaten/Kota tidak memiliki analisis masalah yang relevan dengan variabel pada penghitungan	Langkah promotif dan intervensi yang dilakukan kurang efektif	Koordinasi dengan Bapanas dan BPS guna menganalisis variabel pembentuk skor PPH di	Bidang Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Desember 2025

Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				PPH		Kabupaten/Kota se Jawa Tengah		
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase Peningkatan Volume Bahan Pangan Yang Didistribusikan Untuk Stabilisasi Harga	Akses Pangan Masyarakat Terganggu	9	Tidak semua wilayah memiliki sumber pangan strategis, Pendistribusian bahan pangan tidak dapat menjangkau semua wilayah Jawa Tengah	Harga pangan fluktuatif	Pemantauan ketersediaan dan harga pangan di setiap wilayah secara periodik	Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan	2025
	Prosentase Sasaran Stabilisasi Harga Sesuai Dengan SOP	Masih ada disparitas/ volatile harga pangan strategis	9	Intervensi harga pangan belum optimal	Kerugian bagi produsen saat harga jatuh dan keterjangkauan di tingkat konsumen saat terjadi kenaikan harga secara signifikan.	Penyaluran subsidi harga pangan tingkat produsen dan konsumen	Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan	2024-2026
	Jumlah Dokumen Rekomendasi Ketersediaan Pangan Yang Diusulkan	Rekomendasi Ketersediaan Pangan yang diusulkan tidak sesuai dengan kondisi di lapangan	12	Data yang tersedia tidak update	Pangan tidak tersedia secara merata sepanjang tahun di wilayah Jawa Tengah	Validasi Data secara Periodik	Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan	2025
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Persentase Peningkatan Volume Cadangan Pangan	Tidak terpenuhinya cadangan pangan minimal	9	Kurang optimalnya sarpras penunjang pemuhan kebutuhan	Kekurangan cadangan pangan pemerintah provinsi	Penitipan cadangan pangan pemerintah provinsi ke	Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan	Desember 2025

Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Presentase Penurunan Daerah Rawan Pangan Dan Gizi	Bertambahnya daerah rawan pangan	9	Desa Rawan Pangan belum tertangani secara maksimal, Intervensi hanya berupa bantuan pangan, dan bersifat sesaat sehingga belum berpengaruh terhadap aspek yang lain	Desa Rawan Pangan yang ditangani belum dapat naik ke level prioritas yang lebih tinggi	Koordinasi dengan lintas OPD yang mempengaruhi indikator rawan pangan	Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi	2024 - 2026
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Persentase Penanganan Desa Rawan Pangan Dan Gizi	Bantuan pangan tidak sesuai spesifikasi	10	Adanya mark-up harga pada saat pengadaan bantuan pangan	Menurunnya kualitas bantuan pangan yang diterima masyarakat, adanya aduan masyarakat	Koordinasi dengan Bappeda dan OPD terkait penanganan daerah rawan pangan yang membutuhkan bantuan di luar aspek pangan	Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi	2024-2026

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Ketahanan Pangan (DISHANPAN) Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 merupakan penjabaran proses pencapaian tujuan DISHANPAN yang memperhatikan pada percepatan pencapaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jateng tahun 2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029, Program Kegiatan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 yang diselaraskan dengan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah terpilih 2025-2029, arah kebijakan Prioritas Nasional, serta hasil evaluasi kinerja DISHANPAN Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 sampai dengan TW II serta disesuaikan dengan perubahan dinamika yang terjadi.

Penyusunan Renja Perubahan Tahun 2025 lebih bersifat operasional sebagai pedoman pelaksanaan kebijakan program kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta akan diperoleh peningkatan kualitas perencanaan sesuai dengan sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) DISHANPAN Provinsi Jawa Tengah tahun 2025-2029. Selanjutnya Renja Perubahan menjadi pedoman dalam penyusunan RKA dan DPA Perubahan lingkup DISHANPAN Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.

Renja Perubahan DISHANPAN Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 tetap difokuskan pada kegiatan yang mendukung upaya Peningkatan Ketahanan Pangan di Provinsi Jawa Tengah melalui 3 Pilar Ketahanan Pangan yaitu:

- 1) Aspek Ketersediaan, antara lain berupa a. Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah yaitu penyediaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan dalam rangka mengantisipasi/menghadapi keadaan darurat, menaggulangi kebutuhan pangan pada daerah rawan / penanganan kemiskinan serta untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan; b. Fasilitasi Kelompok / Pelaku Usaha Pengembangan Pangan Olahan Lokal dan Pangan Pokok Lokal dengan tujuan menjaga pasokan stok pangan (terutama pangan lokal) melalui peningkatan produktivitas / nilai tambah dan mensubstitusi bahan pangan yang tergantung dari negara lain / impor;
- 2) Aspek Keterjangkauan, antara lain berupa a. Fasilitasi Distribusi Pangan yaitu fasilitas pembiayaan distribusi (bongkar muat, transportasi dan kemasan) yang diberikan kepada produsen (petani/ peternak/ gapoktan/ poktan/ distributor/ pelaku usaha pangan lainnya) untuk menyalurkan bahan pangan strategis ke masyarakat, dalam rangka pengendalian pasokan dan harga pangan serta penanganan gejolak harga pangan / harga pangan tetap stabil dan terjangkau melalui Kios Pangan Murah, Gerakan Pangan Murah atau intervensi lainnya, b) Subsidi Harga Pangan Sumber Energi kepada Masyarakat Rawan Pangan dan Gizi yaitu Subsidi harga pangan yang dieberikan kepada Masyarakat / Rumah Tangga Miskin dalam upaya menurunkan Angka Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernutrition - PoU), Subsidi Harga Pangan kepada Keluarga dengan Anak Berisiko Stunting, Subsidi Harga Pangan tingkat Produsen dan Konsumen (Subsidi Harga Pangan tersebut diharapkan dapat membantu

masyarakat khususnya mendapatkan pangan dengan harga yang terjangkau); Pencegahan Food Waste sosialisasi, edukasi dan gerakan pencegahan pangan berlebih berpotensi menjadi food waste bersama lembaga/instansi terkait, asosiasi dan organisasi penggiat pencegahan food waste serta fasilitasi penyaluran pangan yang berpotensi terbuang atau dimusnahkan namun masih dalam kondisi layak dan aman serta tidak termasuk pangan sisa/leftover food kepada masyarakat dan pihak-pihak yang membutuhkan;

3) Aspek Pemanfaatan Pangan meliputi a. Fasilitasi Desa B2SA berupa sosialisasi dan edukasi pola konsumsi B2SA dalam upaya meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat; b. Promosi pangan lokal yaitu pengenalan pangan lokal (pengganti beras dan terigu (beras analog, beras sorgum, mie mokaf, tepung mokaf, pati irut, kukis berbahan baku pangan lokal dll)) kepada masyarakat; c. Subsidi harga pangan lokal yaitu pemberian subsidi harga pangan lokal (pengganti beras dan terigu) dengan tujuan produk pangan lokal dapat kompetitif di pasar, mendorong keberlanjutan usaha serta memperkuat produksi dan konsumsi pangan lokal; d. Pengawasan dan Edukasi Keamanan dan Mutu Pangan; e. Sertifikasi, registrasi, uji keamanan dan mutu pangan

Keberhasilan pelaksanaan program kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah perlu dilaksanakan koordinasi, sinkronisasi, kolaborasi internal dan eksternal serta dilaksanakan pengendalian, pengawasan dan evaluasi secara intensif. Selain itu diperlukan adanya dukungan dan komitmen seluruh sumber daya lingkup DISHANPAN Provinsi Jawa Tengah.